

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Indonesia merupakan bangsa yang besar, kaya akan sumber daya alam, memiliki keberagaman budaya, serta secara geografis memiliki posisi yang sangat strategis. Berdasarkan jumlah pertumbuhan penduduk, Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi menyongsong tahun 2045. Selain itu, dalam menghadapi *megatren global*, yang di antaranya berkaitan dengan perkembangan teknologi dan sumber daya alam, Indonesia memiliki berbagai potensi yang unggul. Modal tersebut mendorong pemerintah untuk menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang secara intens berfokus pada Indonesia Emas 2045.

Indonesia Emas 2045 diartikan sebagai seratus tahun Indonesia merdeka dan momentum bangsa Indonesia menjadi negara Nusantara yang berdaulat, adil, makmur dan berkelanjutan. Dalam mewujudkan visi-misi tersebut, kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila, dijadikan sebagai landasan utama. Selain itu, berbagai modal dasar, seperti kekayaan alam, bonus demografi, dan keberhasilan pembangunan dalam dua dekade terakhir, dijadikan pemerintah sebagai pijakan yang menunjang upaya menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam mewujudkan cita-cita mulia tersebut, kemerdekaan yang diperjuangkan para pendiri bangsa merupakan pintu masuk menuju Indonesia Emas 2045. Dalam hal ini, pemerintah berperan selain sebagai perwakilan rakyat, juga sebagai representasi dari para pendiri bangsa yang berupaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu bangsa Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Pemerintah sebagai penyedia kesejahteraan dan penjamin kemerdekaan harus berupaya mempertanggungjawabkan kekuasaan kepada kedaulatan rakyat berlandaskan Konstitusi dan etika moral.

Berangkat dari landasan dan modal dasar yang termuat dalam RPJPN, cita-cita menuju visi-misi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai apabila berbagai persoalan

yang berkaitan dengan kepentingan terselubung harus diatasi terlebih dahulu dalam lingkaran kekuasaan. Hal ini disebabkan oleh adanya upaya memenuhi berbagai kepentingan dalam kekuasaan. Dapat dikatakan bahwa kekuasaan masih menjadi instrumen yang menggiurkan. Kekuasaan sering kali dianggap sebagai jalan menuju dominasi, pengaruh, serta kesempatan untuk mewujudkan kepentingan pribadi, kelompok, atau bahkan ideologi tertentu.

Di Indonesia, dinamika transaksional antar kepentingan elit, serta praktik gimik politik masih menjadi fenomena yang kerap mewarnai panggung politik nasional. Koalisi yang dibentuk sering kali bukan didasarkan pada kesamaan visi dan misi untuk rakyat, melainkan lebih pada kalkulasi kepentingan politik dan bagi-bagi kekuasaan. Dalam konteks ini, arah kebijakan publik yang seharusnya berpihak kepada rakyat justru seringkali berseberangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti hukum, Konstitusi, serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan, yang seharusnya menjadi fokus utama dalam proses pengambilan keputusan politik.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut menyongsong Indonesia Emas 2045, selain merujuk pada RPJPN 2025-2045, pemikiran Tan Malaka mengenai *Merdeka 100%* dan konsep *Logika mistika* perlu dijadikan referensi penting dalam merancang arah pembangunan nasional. Pemikiran Tan Malaka tentang *Merdeka 100%* menekankan bahwa kemerdekaan sejati tidak hanya berarti bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga mencakup kemandirian dalam bidang politik dan ekonomi. Menurut Tan Malaka, kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya simbolis. Ia mengkritik bagaimana kekuasaan seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan tersembunyi dan menegaskan bahwa pemerintah seharusnya berperan sebagai pelindung kesejahteraan rakyat, serta menjaga kedaulatan politik dan ekonomi bebas dari pengaruh asing atau dominasi elit tertentu. Dalam kerangka *Merdeka 100%*, Tan Malaka menekankan bahwa kedaulatan rakyat harus menjadi dasar utama bagi kedaulatan negara, yang menjadikan pemerintah sebagai penggerak utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemandirian sejati,

dan bukan sekadar alat kekuasaan untuk segelintir orang. Oleh karena itu, kebijakan publik yang berdaulat menjadi sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang menjawab kebutuhan rakyat secara langsung, bersifat jangka panjang, serta mendukung pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

Selanjutnya, dalam pemikiran *Logika mistika*, Tan Malaka mengkritisi kecenderungan masyarakat yang mudah terpengaruh oleh gimik dan propaganda politik tersembunyi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa masih banyak individu yang belum mampu berpikir kritis terhadap berbagai isu dan persoalan yang terjadi. Untuk mengatasi hal ini, Tan Malaka menawarkan pendidikan sebagai solusi utama. Pendidikan yang merata dan berkualitas diyakini dapat melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, kritis, dan memiliki daya saing tinggi. Selain itu, pendidikan juga memegang peranan penting dalam membangun narasi kebangsaan yang kokoh. Dengan SDM yang berkualitas, masyarakat akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan sosial, politik, dan pembangunan bangsa di masa depan.

Dengan demikian, menurut Tan Malaka, demokrasi bukan hanya sekadar bentuk, melainkan juga sebuah perjuangan untuk mewujudkan substansi yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, nilai-nilai dasar negara seperti keadilan, persamaan, dan kesejahteraan sosial harus menjadi prinsip utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi yang sehat tidak hanya menekankan kebebasan individu, tetapi juga pentingnya tanggung jawab kolektif untuk menjaga persatuan dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan kesejahteraan yang berpihak pada rakyat, diperlukan pemerintahan yang memiliki komitmen kuat dalam menerapkan kebijakan politik ekonomi yang berdikari, tanpa campur tangan kepentingan luar. Dalam pengambilan kebijakan publik, pemerintah harus bersikap transparan, bebas dari kepentingan tersembunyi, serta melibatkan partisipasi aktif rakyat. Kebijakan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang menyeluruh, meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan, agar cita-cita bangsa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, adil, makmur, dan berkelanjutan dapat terwujud.

4.3 Saran

Mengingat bahwa pendidikan memegang peranan krusial sebagai faktor utama dalam mendorong dan menentukan kemajuan suatu bangsa, maka kebijakan-kebijakan di bidang ini harus menjadi perhatian utama pemerintah, serta dijaga dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Dalam hal ini, ada beberapa kebijakan penting yang perlu diambil.

Pertama, pemerintah perlu meluncurkan program pendidikan gratis dan memperbaiki infrastruktur pendidikan di sekolah, perguruan tinggi, serta lokasi strategis lainnya agar distribusinya lebih merata, berkualitas, dan berbasis teknologi. Kemudahan akses terhadap sumber ilmu pengetahuan seperti buku dan internet juga perlu ditingkatkan dan disebarluaskan secara adil untuk mendorong peningkatan literasi masyarakat di seluruh daerah. Selain itu, peningkatan kapasitas para pendidik dalam memanfaatkan teknologi serta pendekatan pembelajaran yang inovatif sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional.

Kedua, sistem pendidikan harus lebih menekankan pentingnya pembangunan narasi kebangsaan. Ini mencakup pemahaman tentang posisi historis Indonesia dalam tatanan global, nilai-nilai luhur yang dijunjung, serta tujuan kolektif sebagai bangsa dan negara. Dalam membentuk narasi tersebut, pendidikan dasar harus dititikberatkan pada penguatan nilai-nilai moral, etika, pluralisme, dan pendidikan kewarganegaraan. Pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kurikulum sebaiknya diarahkan pada pemahaman filosofi pendidikan yang mengakomodasi nilai budaya lokal dan kesiapan menghadapi dunia kerja. Khususnya dalam penguatan identitas kebangsaan, pembelajaran sejarah harus terbebas dari pengaruh politik atau kekuasaan yang sedang berkuasa. Selain itu, pendidikan tinggi juga perlu mengintegrasikan pemikiran-pemikiran filsuf Nusantara, seperti Ki Hajar Dewantara, Tan Malaka, Pramoedya Ananta Toer, dan para pemikir lain. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan konteks budaya lokal serta tantangan global masa kini.

Selain menjadikan pendidikan sebagai dasar utama, dalam kehidupan demokratis juga diperlukan reformasi di bidang politik. *Pertama*, politik harus dipahami sebagai sarana perjuangan demi kesejahteraan rakyat, bukan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan elit tertentu. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai etika dan moral dalam politik serta menjamin independensi lembaga-lembaga non-eksekutif dan non-legislatif seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, dan Komnas HAM. *Kedua*, perlu dipastikan bahwa politik bebas dari pengaruh kepentingan yang merugikan negara dan rakyat. Dalam konteks ini, penyusunan kebijakan publik harus melibatkan partisipasi masyarakat, mempertimbangkan realitas kehidupan sosial, dan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Selanjutnya, reformasi juga dibutuhkan dalam sektor ekonomi. Pemerintah menghidupkan kembali sistem ekonomi Pancasila yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Sistem ini menekankan prinsip gotong royong dalam pengelolaan ekonomi nasional serta menegaskan bahwa sektor-sektor vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus berada di bawah kendali negara. Berdasarkan prinsip tersebut, pemerintah mulai menerapkan kebijakan yang mendukung penguatan ekonomi rakyat, salah satunya di antaranya adalah dengan mengembangkan dan memberdayakan UMKM. Upaya ini dilakukan melalui pemberian insentif, kemudahan perizinan, akses pembiayaan melalui koperasi dan bank rakyat, serta pelatihan dan pendampingan usaha. Tujuannya adalah membangun kemandirian ekonomi kerakyatan.

Di samping itu, reformasi ekonomi juga diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih adil, sehat, dan kompetitif. Pemerintah mulai merevisi regulasi yang membebani pelaku usaha kecil dan mendorong terciptanya sistem distribusi yang lebih merata serta mendukung produsen dalam negeri. Dengan demikian, sistem ekonomi Pancasila tidak hanya menjadi dasar filosofis, tetapi juga tercermin dalam kebijakan-kebijakan nyata yang berpihak kepada rakyat dan berorientasi pada pemerataan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Utama

- Malaka, Tan. (1987). *Naar De Republiek Indonesia*. Yayasan Massa.
- _____. (1987). *Parlemen atau Soviet*. Yayasan Massa.
- _____. (2000). *Gerpolek: Gerakan-Politik-Ekonomi*. 109.
- _____. (2000). *Dari Penjara Ke Penjara, Jilid I*. Teplok Press.
- _____. (2005). *Merdeka 100%: Tiga Percakapan Ekonomi Politik (1945)*. Marjin Kiri.
- _____. (2010). *Madilog*. Narasi.
- _____. (2015). *Situasi Politik luar dan dalam Negeri dalam Catatan-Catatan Perjuangan*. Sega Asry.

Sumber Sekunder

- A.A Nawis. (2021). *Pemikiran Minangkabau*. Penerbit Angkasa.
- Akira Nagazumi. (1989). *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo, 1908-1918*. Pustaka Grafitipers.
- Alexander Jebadu. (2021). *Dalam Moncong Neoliberalisme*. Peberbit Ledalero.
- Alfian. (1994). *Tan Malaka: Pejuang Revolusioner yang Kesepian, dalam Manusia dalam Kemelut Sejarah*. LP3ES.
- Amir. (2017). *Indonesia Siapa Kita*. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Analisis Profil Penduduk Indonesia. dalam Badan Pusat Statistik*. Badan Pusat Statistik.
- _____. (2023). *Bonus Demografi dan Visi Indonesia Emas 2045. dalam Badan Pusat Statistik*. Badan Pusat Statistik.
- Biro PMI Sekretariat Presiden. (2019). *Lima Fokus Kerja di Periode Kedua*

Pemerintahan Jokowi. KPPIP.

Franz Magnis Suseno. (2021). *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (kesebelas). PT Gramedia Pustaka Utama.

Handoyo, B. (2021). *Geografi* (Vol. 1). Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Komplek Kemdikbudristek Jalan RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan.

Harry A. Poeze. (2000). *Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik 1897-1925*. Grafiti.

_____. (2008). *Tan Malaka: Gerakan Kiri dan-Revolusi Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.

Hasan Nasbi A. (2004). *Filosofi Negara Menurut Tan Malaka*. LPPM Tan Malaka.

Ihsanuddin. (2010). *Tan Malaka dan Revolusi Proletar*. Resist Book.

Ir. Soekarno. (2015). *Mentjapai Indonesia Merdeka*.

Kementerian PPN/Bappenas. (2019). Berdaulat, Maju, Adil , dan Makmur. *Sistem Manajemen Pengetahuan*, 32, 1–25.

_____. (2023). *Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045* (p. 315). Kementerian PPN/Bappenas.

Leirissa, R. ., Ohorella, G. ., & Tangkilisan, Y. B. (1996). *Sejarah Perekomian Indonesia*. Departemen Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

Limanseto, H. (2024). Wujudkan Visi “Indonesia Emas 2045”, Pemerintah Luncurkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*, 1–5.

Lukman Hakiem. (2020). *Dari Punggung Sejarah Bangsa: Belajar dari Tokoh dan Peristiwa*. Pustaka Al-Kautsar.

- Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2000). *UUD Negara RI Tahun 1945*. 1–28.
- Masykur Arif Rahman. (2018). *Tan Malaka: Sebuah Biografi Lengkap*. Penerbit Laksana.
- Priyono dan Usman Hamid (Ed) Ae. (2014). *Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca-Reformasi* (AE Priyono dan Usman Hamid (ed.); Pertama). Kepustakaan Populer Gramedia bekerja sama dengan Public Virtue Institute, Hivos, dan Yayasan Tifa.
- Prof. Miriam Budiardjo. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahman Mulyawan. (2015). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Unpad Press.
- Safrizal Rambe. (2003). *Pemikiran Politik Tan Malaka: Kajian Terhadap Perjuangan Sang Kiri Nasionalis*. Pustaka Belajar.
- Said Hamid Hassan dkk. (2016). *History of Indonesia*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
- Santosa, K. O. (2014). *Tan Malaka: Seorang Nasionalis Muslim Bersemangat Marxis, dalam Tan Malaka, Menuju Republik Indonesia*. Segi Asry.
- Sunardi, S. (2001). *Nietzsche*. LKiS.
- Susilo, T. A. (2008). *Tan Malaka: Biografi Singkat 1897-1949*. Garasi.
- Tempo. (2010). *Tan Malaka Bapak Republik Yang Dilupakan*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Valina. (2014). *Partai Syarikat Islam Indonesia: Konstestasi Politik Hingga Konflik Kekuasaan Elite*. Yayasan Obor Indonesia.
- Zen, A. P. M., Widyanto, A., Siregar, H., O'Neill, I., Ageung, I. V., Kuswardono, T., & Maimunah, S. (2006). *Freeport: Bagaimana Pertambangan Emas dan Tembaga Raksasa Menjajah Indonesia* (Siti Maimunah (ed.)). Wahana

Lingkungan Hidup Indonesia.

Zulhasril Nazir. (2007). *Tan Malaka dan Gerakan Kiri Minangkabau di Indonesia, Malaysia, dan Singapura*. Ombak.

Jurnal

Adnyana, K. R. T. (2022). Kedaulatan Negara dalam Hukum Internasional. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 32–41.

Afiyah, M. S. (2021). Reformasi Ekonomi Habibie 1998-1999: Sebuah Kebijakan Atasi Krisis Ekonomi Orde Baru. *Sejarah Dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 15(2), 249.

Ahmad Nurhudai, Y. Z. A. (2021). Kepemimpinan Presiden Megawati Pada Era Krisis Multidimensi, 2001-2004. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 11(1), 49–66.

Aprianto, E. (2016). Peran Abdurahman Wahid dalam Politik di Indonesia (1999 - 2001). *Intelektualita*, 5(2), 132–144.

Bigraf Triangga. (2022). Pemikiran Tan Malaka. *Binus University Business School*.

Dewi, N. K. (2024). Reformasi 1998 : Transisi dari Orde Baru ke Era Demokrasi di Indonesia. *Historia Vitae*, 04(02), 76–90.

Kurnia, E., Pebryanti, A. P., Rahmadini, A., Safira, N., & Hidayati, S. (2023). Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono: Faktor Rakyat Indonesia Memilih Kembali Pada Periode Ke-2. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 401-413.

Nasir, M. (2015). Demokrasi dan Amerika Serikat. *Jurnal The Politics*, I, No 1(1), 12.

Reza Adeputra Tohis. (2013). “Biografi dan Karya Intelektual Tan Malaka. Studi Historis-Faktual Tokoh”, 2:1 (Manado, Agustus 2013), hlm. 95. *Journal of Islamic History and Civilization*, 2(1), 95.

Ruslina, E. (2016). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 49.

Wahid, A. (2016). Kode Etik Peserta Pemilu Sebagai Penguatan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Etika Dan Pemilu*, 2(3), 10.

Wibawanto, G. R. (2019). Melacak Materialisme Dialektis Tan Malaka Dalam Sejarah Ilmu Sosial Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(2), 169.

Skripsi

Dampur, Stefanus. “Perubahan Paradigma Berpikir Mistis-Pasif menuju Rasional Aktif: Telaah atas Pemikiran Filsafat Sosial Politik Tan Malaka dalam Madilog” *Skripsi*, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2006.

Meto, Yohanes Efraim More. “Sosialisme Kerakyatan: Memperkenalkan Idealisme Politik Tan Malaka” *Skripsi*, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2008.

Pice, Lazarus. “Indonesia yang Sosialis: Konsep Negara menurut Tan Malaka”. *Skripsi*, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2002.

Internet

Ady Thea. (2022). 3 Alasan Koalisi Masyarakat Kaltim Desak UU IKN Dibatalkan. Hukum Online.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-alasan-koalisi-masyarakat-kaltim-desak-uu-ikn-dibatalkan-lt61e784712d965/?page=3>

Aminah Nurmillah. (2021). “Indonesia Maju 2045: Kenyataan atau Fatamorgana”, dalam *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13781/Indonesia-Maju-2045-Kenyataan-atau-Fatamorgana.html>

Andi Saputra. (2021). MK: Pembentuk UU Cipta Kerja Tak Beri Ruang Partisipasi Publik Secara Maksimal. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-5827692/mk-pembentuk-uu-ciptaker-tak-beri-ruang-partisipasi-publik-secara-maksimal>

Andi Yuliani. (2025). *Hak Konstitusional Warga Negara*. Bagian Hukum Dan HAM

- Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi. <https://jdih.sukabumikab.go.id/v1/artikel/detail/5/hak-konstitusional-warga-negara>
- Andika Dwi. (2003). *Alasan Anies Baswedan dan PKS Tidak Setuju Proyek IKN*. Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/alasan-anies-baswedan-dan-pks-tidak-setuju-proyek-ikn-115950>
- Aranditio, S. (2023). *UU Cipta Kerja Sah: Masyarakat Desa dan Buruh Semakin Resah*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/03/24/uu-cipta-kerja-sah-masyarakat-desa-dan-buruh-semakin-resah>
- Arga Sumantri. (2024). *Bawaslu RI Mengungkap Ada 130 Kasus Politik Uang Pilkada 2024 di Seluruh Indonesia*. Metro TV. <https://www.metrotvnews.com/read/KYVCDLBq-bawaslu-ri-ungkap-ada-130-kasus-politik-uang-pilkada-2024-di-seluruh-indonesia>
- Bagus Muljadi. (2024a). *Negeri Ini Pernah Jadi Surganya Ilmuwan Dunia*. Gita Wirjayan. <https://youtu.be/iIGHuBhoGC4?si=5UO7XfdGZQ5akKvE>
- Bagus Muljadi. (2024b). *Stop Didikte Negara: Latih Pola Pikirmu Sendiri*. Youtube Bagus Muljadi. <https://youtu.be/r9MLPLkp4Uc?si=FhyrNSqcmxSq1VSe>
- Bivitri Susanti. (2021). *“Negara Hukum Versus Supremasi Hukum” tempo..* <https://www.tempo.co/kolom/beda-negara-hukum-dan-supremasi-hukum-845427>
- Defara Dhanya. (2024). *Kegagalan Proyek Food Estate Singkong Prabowo Subianto, Merusak Hutan dan Sia-sia*. Tempo. <https://www.tempo.co/arsip/kegagalan-proyek-food-estate-singkong-prabowo-subianto-merusak-hutan-dan-sia-sia-98823>
- Fadrik Aziz Firdausi. (2019). *Sejarah Gencatan Senjata RI-Belanda: Awal Mula Pengakuan Kedaulatan*. Tirto.Id. <https://tirto.id/sejarah-gencatan-senjata-ri-belanda-awal-mula-pengakuan-kedaulatan-efnx>

- Gabriela, M. (2024). *Konsesi HGU Nyaris 2 Abad untuk Investor IKN, Berikut Tanggapan Berbagai Pihak*. Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/konsesi-hgu-nyaris-2-abad-untuk-investor-ikn-berikut-tanggapan-berbagai-pihak--40059>
- Hendrik Khoirul Muhid. (2023). *Wacana Jokowi 3 Periode, Begini Sikap Jokowi dari Waktu ke Waktu: Menampar Muka Saya*. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/wacana-jokowi-3-periode-begini-sikap-jokowi-dari-waktu-ke-waktu-menampar-muka-saya-220245>
- Humas. (2024). *Presiden Jokowi Resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-resmikan-istana-negara-di-ibu-kota-nusantara/>
- Humas Fraksi PKS. (2022). *Terkait Ibu Kota Negara (IKN), Politisi PKS: Koordinasi Internal Pemerintah Masih Kacau*. Website Resmi Fraksi PKS. <https://fraksi.pks.id/2022/01/31/terkait-ibu-kota-negara-ikn-politisi-pks-koordinasi-internal-pemerintah-masih-kacau/>
- Hurriyah dan Inaya Rakhmani. (2024). *Merefleksikan perubahan penggunaan media sosial dalam kampanye politik: Pelajaran dari pemilu Indonesia tahun 2024*. Melbourne Asia Review. <https://www.melbourneasiareview.edu.au/reflecting-on-the-changing-use-of-social-media-in-political-campaigns-lessons-from-indonesias-2024-election/>
- Indira Lintang. (2024). *10 Tokoh Ekonomi yang Paling Berpengaruh di Dunia*. Inilah.Com. <https://www.inilah.com/10-tokoh-ekonomi-yang-paling-berpengaruh-di-dunia>
- Irfan Kamil dan Diamanty Meiliana. (2022). *Anggota IKAHI Sebut Intervensi jika Lembaga Peradilan Dievaluasi Presiden*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/15/12353361/anggota-ikahi-sebut-intervensi-jika-lembaga-peradilan-dievaluasi-presiden.%0A>
- M. Rizki Yusrial. (2025). *Ini 13 Poin Tuntutan Demo BEM SI “Indonesia Gelap”*,

- Apa Saja?* Tempo. <https://www.tempo.co/politik/ini-13-poin-tuntutan-demo-bem-si-indonesia-gelap-apa-saja--1208489>
- M Yusuf Manurung. (2018). *Laode KPK: Resolusi 2018, Kasus BLBI dan E-KTP Tuntas*. Tempo. <https://www.tempo.co/hukum/laode-kpk-resolusi-2018-kasus-blbi-dan-e-ktp-tuntas-1007104>
- Mata Najwa. (2017). *Mata Najwa: Kisah Bapak Republik Tan Malaka (3)*. Metro TV. https://youtu.be/UCq1AgCU63o?si=TBqP7QH-Uh2y_Mj_
- Mediana. (2024). *Daya Saing SDM Indonesia Peringkat Ke-46 dari 67 Negara*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/09/19/tingkat-daya-saing-keahlian-sumber-daya-manusia-indonesia-peringkat-ke-46-dari-67-negara-di-dunia>
- Negara, K. S., & Indonesia, R. (n.d.). *Pidato Awal Periode Kedua, Presiden Jokowi: Kerja Keras dan Dobrak Rutinitas*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Retrieved February 21, 2025, from https://www.setneg.go.id/baca/index/pidato_awal_periode_kedua_presiden_jokowi_kerja_keras_dan_dobrak_rutinitas
- Nikolaus, Denty, D. (2023). *Usut Dugaan Intervensi Presiden, Sejumlah Kalangan Dukung DPR Gunakan Hak Interpelasi*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/03/usut-dugaan-intervensi-presiden-sejumlah-kalangan-dukung-dpr-gunakan-hak-interpelasi>
- Richard M Langworth. (2022). *Demokrasi adalah Bentuk Pemerintahan Terburuk menurut Churchill*. RML. <https://richardlangworth.com/worst-form-of-government>
- Rizky Rio Rahmat. (n.d.). *15 Pahlawan Nasional Asal Minang Punya Peran Besar Dalam Sejarah Indonesia*. Harian Haluan. Retrieved January 22, 2025, from https://www.harianhaluan.com/news/pr-106611481/15-pahlawan-nasional-asal-minang-punya-peran-besar-dalam-sejarah-indonesia#google_vignette,

- Sara Coklat. (2020). *Penelitian MIT Sloan tentang media sosial, misinformasi, dan pemilu*. MIT Management Sloan School. <https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/mit-sloan-research-about-social-media-misinformation-and-elections>
- Setiawanto, B. (2016). *Dua tahun membumikan nawacita - ANTARA News*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/590871/dua-tahun-membumikan-nawacita>
- Soekarno. (2022). *Soekarno, Aku Melihat Indonesia, Peri Sandi Huizche*. Peri Sandi Huizche. https://youtu.be/2R_LQbJiPug?si=cIuL715Xz-oOUkla
- Willa Wahyuni. (2024). *Daftar 12 Peristiwa Pelanggaran HAM Berat di Indonesia*. Hukum Online.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/daftar-12-peristiwa-pelanggaran-ham-berat-di-indonesia-lt63bf8f6412ecd/?page=2>
- Willy Aditya. (2024). *Restorasi Narasi Kebangsaan*. Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/726548/restorasi-narasi-kebangsaan#goog_rewarded